

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

#### **REPUBLIK INDONESIA**

# Minutes of Meeting

# Rapat Konsultasi Forum Multi Stakeholder Group (MSG)

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Februari 2022

Waktu : 13.00 s.d. 15.00 wib

Agenda : Persetujuan Laporan EITI Indonesia ke 9

Pembahasan Rencana Kerja 2022

Tempat : Zoom Meeting (Online)

Meeting ID 961 2607 3365

Pimpinan Rapat: Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

#### Resume Hasil Rapat

- 1. Rapat konsultasi MSG dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretaris Jenderal KESDM, Nomor: 27.Und/DI.02/SJN.D/2022 pada tanggal 1 Februari 2022. Rapat dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh perwakilan dari:
  - a. Pemerintah Pusat:
    - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu perwakilan dari Ditjen Minerba; SKK Migas; Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama; dan Pusdatin.
    - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
    - Kementerian Keuangan, yaitu perwakilan dari Ditjen Anggaran dan Setjen Kemenkeu.
    - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu perwakilan dari Ditjen
      Administrasi Umum.
  - b. Pemerintah Daerah: Badan Pengelola Migas Aceh, Sekretaris Daerah
    Provinsi Aceh diwakili oleh Kadin ESDM Aceh

- c. Asosiasi Industri: Indonesia Petroleum Association (IPA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesian Mining Association (IMA).
- d. Organisasi Masyarakat Sipil: PWYP Indonesia dan IDEA
- e. Sekretariat EITI International

# 2. Tujuan rapat adalah:

- a. Konsultasi dan pembahasan Laporan *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) Indonesia ke-9 yang meliputi tahun 2019 dan 2020.
- b. Konsultasi dan pembahasan draft Rencana kerja EITI Indonesia tahun 2022.
- 3. Forum MSG dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam KESDM, selaku Ketua Pelaksana Harian EITI Indonesia, selanjutnya rapat dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Informasi ESDM. Pembahasan dalam rapat meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tujuan dan ruang lingkup Laporan EITI Indonesia ke-9.
  - b. Perbaikan Pelaporan EITI Indonesia ke-9 dari laporan periode sebelumnya dan kendala yang perlu diselesaikan oleh anggota MSG terkait.
  - c. Timeline Penyusunan Laporan EITI dan masukan yang telah diberikan oleh anggota MSG dan telah diakomodasi dalam Laporan EITI ke 9.
  - d. Revenue Flow Industri Ekstraktif tahun 2020 dan kontribusi sektor industri ekstraktif pada perekonomian nasional.
  - e. Draft Rencana Kerja EITI Indonesia 2022 dan rancangan desain Portal Data Industri Ekstraktif Indonesia.

#### 4. Keputusan Tindak Lanjut Forum MSG:

- Semua anggota MSG, khususnya Kementerian/Lembaga terkait, dapat memberikan masukan pada Laporan EITI ke-9 hingga 20 Februari 2022.
- Semua anggota MSG dapat memberikan masukan pada draft Rencana kerja EITI Indonesia 2022 hingga waktu 2 minggu.
- Perihal kendala yang sudah dipaparkan dalam penyusunan pelaporan, di antaranya, laporan pertambangan per jenis usaha dalam LKPP dan laporan pajak industri ekstraktif, akan ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan instansi teknis terkait.
- Adanya usulan forum transisi energi sebagai kontribusi EITI pada sebagai persiapan Indonesia pada Forum G20.

## Pertanyaan dan Tanggapan dari Forum MSG

# Kementerian ESDM

- 1. Staf Ahli KESDM bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sampe L Purba memberi tanggapan bahwa catatan PWYP Indonesia yang cukup lengkap serta sangat mengapresiasi karena membutuhkan effort sangat besar, begitu pula untuk rekan-rekan di asosiasi dan Ditjen pembina kegiatan minerba dan migas dapat menjembatani dan memfasilitasinya, kaitannya dengan contract disclosure untuk memastikan 2 hal:
  - Volunteer Disclosure
  - Perbandingan atau pembukaan bertahap
- 2. Kapusdatin menyampaikan bahwa
  - keterbukaan kontrak merupakan kajian dengan melihat dari aspek hukum seberapa luas keterbukaan kontrak dapat diakomodasi.
  - sekretariat membuka sinergitas program terkait implementasi mainstreaming kepada semua pihak stakeholder.
  - masukan semua pihak/stakeholder akan ditunggu dalam 2 minggu ke depan untuk kelengkapan Laporan EITI ke-9.

# Indonesian Mining Association (IMA)

1. IMA memastikan bahwa perihal pengadaan jasa konsultan keterbukaan kontrak adalah berupa kajian dan termasuk uji konsekuensi.

## Kementerian Keuangan

- Kemenkeu setuju untuk menyiapkan data-data keuangan yang dibutuhkan dalam bentuk akses data langsung atau API. Namun, secara teknis perlu dibahas perizinan terlebih dahulu kepada produsen data terkait data yang publik dan data yang terbatas untuk akses publik.
- 2. Kemenkeu menyarankan uji konsekuensi terkait kontrak tanpa melibatkan Komisi Informasi Publik (KIP) akan terjadi conflict of interest, karena pada prinsipnya mengetahui materi mana yang ada harus dibuka dan ditutup adalah kita sendiri, sehingga pada saat terjadi sengketa diharapkan tidak terjadi conflict of interest antara badan publik dengan Komisi Informasi Publik (KIP).

## PWYP Indonesia

- 1. PWYP akan menyampaikan masukan secara tertulis terkait laporan EITI ke-9.
- Meskipun tidak direkonsiliasi, data penerimaan negara bisa dapat disampaikan dengan kualitas dan tingkat komprehensif yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
- 3. Paparan tentang sisi teknis pertambangan minerba dan migas lebih bagus dan detail daripada laporan sebelumnya. Yang perlu lebih dikuatkan adalah bagian pelaporan pendapatan negara atau sektor keuangan, dapat ditambah substansinya, terutama penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak.
- Penerimaan dana bagi hasil dalam UU HKPD No 1 Tahun 2022 dimana perubahan mekanisme antara pusat dan daerah, bisa dimunculkan dalam laporan.
- 5. Sosialisasi terkait UU ini, CSO berharap ada tabel nama-nama perusahaan pelapor. Contoh, perusahaan minerba ada 150 yang melapor.
- 6. Ada beberapa istilah atau singkatan yang perlu dibuatkan tabel sehingga bahasa lebih sederhana untuk dibaca oleh masyarakat umum.
- 7. Data masih belum *update* untuk tahun 2021 (terkait cadangan lelang, dll)
- 8. Data yang dibutuhkan adalah data *lifting* migas per perusahaan, DMO migas per perusahaan untuk memperkaya laporan
- 9. Data *breakdown* PPh di sektor pertambangan dapat gambar utuh dalam konteks penerimaan negara
- 10.Bab 2 berkaitan dengan kerangka hukum terdapat UU Cipta Kerja dan UU Minerba sudah ada hasilnya dari MK
- 11. Kontrak transparansi memberikan informasi, komisi pusat telah putusan sengketa, bahwa dokumen kontrak adalah dokumen publik.
- 12.PWYP memberikan usulan terkait kajian jangan terlalu banyak di bidang hukum keterbukaan kontrak, sehingga lebih baik lebih mendetail seperti fokus kajian satu kontrak dari awal halaman hingga akhir. Lebih baik secara langsung membuka satu contoh kontrak dan lebih ke uji konsekuensi
- 13. Terkait dengan *workplan* poin 1, jika dimungkinkan bisa berembuk tema terkait webinar dan dialog tematik paling relevan yang terdapat di Indonesia saat ini.
- 14. Terkait persiapan Indonesia G20 tentang forum suatu transisi energi untuk kaitannya dengan kontribusi terhadap G20.

# Indonesia Petroleum Association (IPA)

1. Karena *oil* dan gas merupakan milik pemerintah, kajian ini masih berjalan dan kapan pihak IPA akan di diskusikan ini bersama secara detail.

#### Ditjen Mineral dan Batubara KESDM

- 1. Ditjen Minerba telah memberikan masukan Laporan EITI ke-9 secara tertulis.
- 2. Jika memungkinkan dalam EITI International dibuat ranking atau indeks, sehingga dapat diketahui keberadaan posisi Indonesia.

# **SKK Migas**

1. Ada beberapa data laporan belum disampaikan dari KKKS, yang akan dikoordinasikan untuk menanyakan terkait belum menyampaikan data

## Konsultan EITI International

- 1. Dalam hal mendemonstrasikan tentang adanya indeks untuk mengukur tingkat transparansi Indonesia Validasi Indonesia tahun 2023 adalah peluang paling bagus untuk memberikan laporan EITI. Pada saat validasi, MSG akan melihat persyaratan-persyaratan yang telah atau belum dipenuhi, serta akan melihat poin-poin lain yang penting dalam standar transparansi. Sebagai contoh, laporan penerimaan pajak dan non-pajak akan dinilai dengan standar EITI dalam cara yang komprehensif, baik level agregasi yang ada dan detil.
- Dalam proses validasi akan ada penilaian secara keseluruhan dari masingmasing negara berdasarkan level exposure dalam laporan EITI dan juga implementasi secara umum. Hal ini dirangkum dalam mekanisme validasi dan dapat dilihat pada link: <a href="https://eiti.org/validation">https://eiti.org/validation</a>
- Terkait dengan Disclosure dan aktivitas yang terefleksi dari rencana kerja sekretariat Indonesia, dan saran transisi energi oleh PWYP Indonesia, sebagai perwakilan CSO, ini sejalan dengan asistensi yang akan ditindaklanjuti oleh Sekretariat EITI Internasional.
- 4. Terkait penyampaian rencana kerja, EITI Indonesia telah cukup baik menyusun rencana kerja untuk mencapai tujuan secara nasional, meningkatkan pemahaman kepada pihak-pihak terkait industri ekstraktif, serta mendorong investasi melalui upaya yang lebih transparan, termasuk dalam hal dana-dana sosial dan topik terkait isu gender.

- Tujuan utama untuk membuat pengelolaan sektor ekstraktif ini menjadi berkelanjutan sudah sangat tepat dalam penyampaian rencana kerja yang dipaparkan.
- 6. Pada rencana kerja 2022 ini dapat menunjukan tujuan sekretariat Indonesia, namun dari Sekretariat International memberikan catatan pada kejelasan tujuan sektor industri ekstraktif yang sejalan dengan tujuan nasional, kesenjangan kapasitas yang dapat dipenuhi dengan kolaborasi antar pihak, serta perlunya mencantumkan anggaran.
- 7. Rencana kerja seharusnya dapat merefleksikan dan mengkomunikasikan hal ini menjadi tujuan untuk pengimplementasian EITI, khususnya terkait pengembangan dan pengarusutamaan serta tujuan yang dapat mengembangkan sistem, untuk meningkatkan produksi dan pembangunan berkelanjutan.

# Tindak Lanjut Forum MSG

- 1. Masukan dari unit-unit Kementerian/Lembaga terhadap laporan EITI ke-9 akan diberikan waktu hingga 20 Februari 2022.
- Draft Rencana Kerja akan diperbaiki berdasarkan masukan dari MSG, serta masukan atas Rencana kerja EITI Indonesia 2022 diberikan waktu hingga 2 minggu.
- 3. Kendala yang sudah dipaparkan dalam penyusunan pelaporan, di antaranya, laporan pertambangan per jenis usaha dalam LKPP dan laporan pajak industri ekstraktif, akan ditindaklanjuti melalui pembahasan dengan instansi teknis terkait.
- 4. Menindaklanjuti usulan forum transisi energi sebagai kontribusi EITI dalam persiapan Indonesia pada Forum G20.

# Lampiran Foto Kegiatan









